

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445155/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
- Sebesar : Rp. 50.358.861.000 (LIMA PULUH MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	13.606.657.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 50.358.861.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

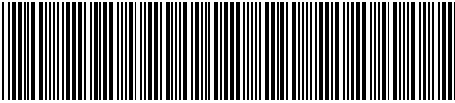
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

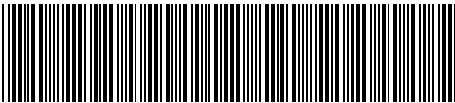


DS:6783-1594-3057-2359

Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	50.358.861.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	2.969.695.000
DR.4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	6.692.731.000
DR.4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	11.315.272.000
DR.4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	9.313.680.000
DR.4127	Registrasi Obat	Rp.	12.654.921.000
DR.4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	7.412.562.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA

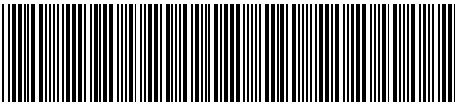


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Program	:	063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan			50.358.861.000
Kegiatan	:	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			2.969.695.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.BKB Pemantauan produk	1,00	laporan	2.969.695.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	laporan	2.969.695.000
Kegiatan	:	4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			6.692.731.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4122.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.305.000.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	2.305.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4122.QAH Pelayanan Publik Lainnya	490,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	781.046.000
Rincian Output	:	01	QAH.001 Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	490.00	dokumen	781.046.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4122.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.606.685.000
Rincian Output	:	01	QIC.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana (PN) Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	167.00	Keputusan	3.606.685.000
Kegiatan	:	4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			11.315.272.000
	:					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA

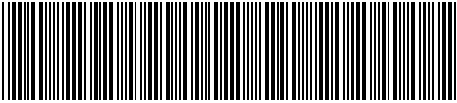


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Klasifikasi Rincian Output	5	:	4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22.500,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	747.994.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	22500.00	dokumen	747.994.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.500,00	Produk, Laporan, Keputusan	2.427.804.000
Rincian Output		:	01	BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	140.00	Laporan	1.654.100.000
		:	02	BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	1360.00	Laporan	773.704.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10,00	Orang, Laporan	2.500.000.000
Rincian Output		:	01	BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	10.00	Laporan	2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	6.012,00	Produk, Laporan, Keputusan	5.639.474.000
Rincian Output		:	01	QIA.001 Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan (PN)	6000.00	Produk	1.117.647.000
		:	02	QIA.002 Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor (PN)	12.00	Laporan	4.521.827.000
Kegiatan		:	4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			9.313.680.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.664.896.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17.00	layanan	2.164.896.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA

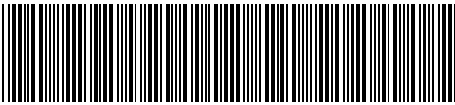


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Pelayanan Publik Lainnya					layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	
	02	BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO		5.00	layanan 2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4125.QAH Pelayanan Publik Lainnya		84,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik 2.542.908.000
Rincian Output	:	01	QAH.001 Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	(PN)	84.00	layanan 2.542.908.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4125.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		150,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, 2.105.876.000
Rincian Output	:	01	QIC.001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	(PN)	150.00	Penyalur, Keputusan Lembaga 2.105.876.000
Kegiatan	:	4127	Registrasi Obat			12.654.921.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	12	:	4127.ACA Perizinan Produk		1,00	Produk, Keputusan 1.000.000.000
Rincian Output	:	01	ACA.001 Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar		1.00	Keputusan 1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4127.BAH Pelayanan Publik Lainnya		1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik 4.000.000.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima		1.00	layanan 4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4127.PCA Perizinan Produk		7.500,00	Produk, Keputusan 7.654.921.000
Rincian Output	:	01	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	(PN)	7500.00	Keputusan 7.654.921.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Perizinan Produk				Produk, Keputusan		
Kegiatan	:	4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			7.412.562.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4131.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.908.245.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan	50.00	Rekomendasi Kebijakan	2.908.245.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4131.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.061.492.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun	8.00	NSPK	3.061.492.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	4131.CAB Sarana Bidang Kesehatan	3,00	Paket, Unit	31.825.000
Rincian Output	:	01	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3.00	Unit	31.825.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,00	Unit	1.411.000.000
Rincian Output	:	01	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	55.00	Unit	1.411.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I B. SUMBER DANA



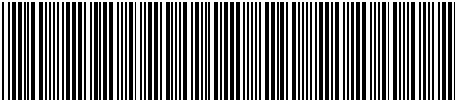
Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.358.861.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000	(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.	13.606.657.000	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

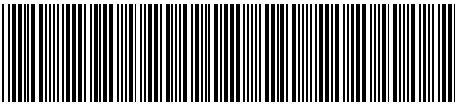


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	-	48.626.036	1.732.825	-	-	50.358.861	01 . 51	
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	48.626.036	1.732.825	-	-	50.358.861		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	2.969.695	-	-	-	2.969.695		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.969.695	-	-	-	2.969.695		
01 RM		-	2.189.437	-	-	-	2.189.437		
04 PNBP		-	780.258	-	-	-	780.258		
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan	-	6.592.731	100.000	-	-	6.692.731		
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.305.000	-	-	-	2.305.000		
01 RM		-	2.305.000	-	-	-	2.305.000		
4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	681.046	100.000	-	-	781.046		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

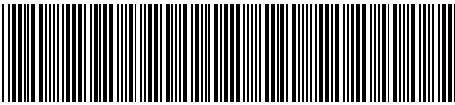


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4122.QIC	01 RM	-	207.638	-	-	-	207.638	175@	
	04 PNB	-	473.408	100.000	-	-	573.408	175@	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.606.685	-	-	-	3.606.685	01 . 51	
4123	01 RM	-	2.519.164	-	-	-	2.519.164	175@	
	04 PNB	-	1.087.521	-	-	-	1.087.521	175@	
	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	-	11.255.272	60.000	-	-	11.315.272		
4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	747.994	-	-	-	747.994	01 . 51	
4123.BIA	01 RM	-	582.787	-	-	-	582.787	175@	
	04 PNB	-	165.207	-	-	-	165.207	175@	
	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.427.804	-	-	-	2.427.804	01 . 51	
01	RM	-	1.547.307	-	-	-	1.547.307	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



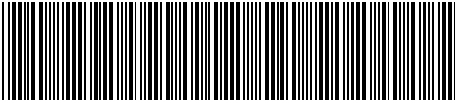
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	880.497	-	-	-	880.497	175@	
4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
01 RM		-	2.260.987	-	-	-	2.260.987	175@	
04 PNB		-	239.013	-	-	-	239.013	175@	
4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.579.474	60.000	-	-	5.639.474	01 . 51	
01 RM		-	4.621.608	60.000	-	-	4.681.608	175@	
04 PNB		-	957.866	-	-	-	957.866	175@	
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	9.313.680	-	-	-	9.313.680		
4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.664.896	-	-	-	4.664.896	01 . 51	
01 RM		-	3.957.434	-	-	-	3.957.434	175@	
04 PNB		-	707.462	-	-	-	707.462	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

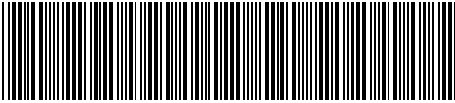


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.542.908	-	-	-	2.542.908	01 . 51	
	01 RM	-	904.170	-	-	-	904.170	175@	
	04 PNBP	-	1.638.738	-	-	-	1.638.738	175@	
4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	01 . 51	
	01 RM	-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	175@	
	4127 Registrasi Obat	-	12.554.921	100.000	-	-	12.654.921		
4127.ACA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
	01 RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@	
	4127.BAH Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	01 . 51	
	01 RM	-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

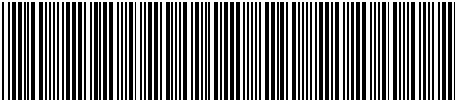


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127.PCA	Perizinan Produk	-	7.654.921	-	-	-	7.654.921	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
	01 RM	-	1.564.586	-	-	-	1.564.586		
	04 PNBP	-	6.090.335	-	-	-	6.090.335		
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	-	5.939.737	1.472.825	-	-	7.412.562	01 . 51	
4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	2.908.245	-	-	-	2.908.245		
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
	01 RM	-	2.901.160	-	-	-	2.901.160		
	04 PNBP	-	7.085	-	-	-	7.085	175@	
4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	3.031.492	30.000	-	-	3.061.492	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
	01 RM	-	3.031.492	30.000	-	-	3.061.492	175@	
4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	31.825	-	-	31.825	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

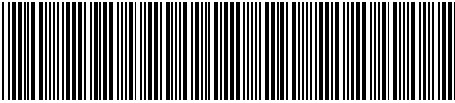
Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4131.CAN	01 RM	-	-	9.780	-	-	9.780	175@	
	04 PNBP	-	-	22.045	-	-	22.045	175@	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	1.411.000	-	-	1.411.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-		-	-			
	01 RM	-	-	953.778	-	-	953.778	175	
	04 PNBP	-	-	457.222	-	-	457.222	175	
JUMLAH		-	48.626.036	1.732.825	-	-	50.358.861		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



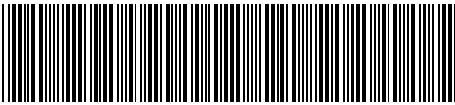
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF													
		RENCANA PENARIKAN DANA	750.277	2.362.868	2.734.608	4.081.892	4.032.679	5.975.783	3.548.550	3.691.054	3.896.836	4.064.793	4.064.814	11.154.706	50.358.861
		BELANJA BARANG	745.277	2.352.590	2.712.105	3.779.512	3.993.385	4.998.218	3.340.097	3.662.725	3.866.596	4.042.893	4.036.524	11.096.113	48.626.036
		BELANJA MODAL	5.000	10.278	22.503	302.380	39.294	977.565	208.453	28.329	30.240	21.901	28.290	58.592	1.732.825
		063.01.DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	24.022	143.911	207.605	238.597	311.089	320.277	263.956	272.185	192.770	218.906	185.761	590.616	2.969.695
		063.01.DR.4122 52 BELANJA BARANG DAN JASA	24.022	143.911	207.605	238.597	311.089	320.277	263.956	272.185	192.770	218.906	185.761	590.616	2.969.695
		Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6.600	129.117	203.109	130.666	346.552	344.203	127.097	203.912	183.127	124.027	162.442	4.731.878	6.692.731
		063.01.DR.4123 52 BELANJA BARANG DAN JASA	6.600	124.117	193.109	125.666	331.552	329.203	122.097	193.912	173.127	119.027	152.442	4.721.878	6.592.731
		53 BELANJA MODAL	0	5.000	10.000	5.000	15.000	15.000	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	100.000
		Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3.136	309.915	450.220	1.083.442	803.113	924.340	1.016.467	951.032	1.028.552	1.028.212	1.119.742	2.597.101	11.315.272
		063.01.DR.4125 52 BELANJA BARANG DAN JASA	3.136	309.637	447.717	1.077.418	796.992	916.988	1.013.013	942.703	1.018.312	1.024.680	1.111.453	2.593.223	11.255.272
		53 BELANJA MODAL	0	278	2.503	6.024	6.121	7.351	3.453	8.329	10.240	3.532	8.290	3.879	60.000
		Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	465.684	465.684	465.684	931.368	931.368	1.397.052	465.684	465.684	931.368	931.368	931.368	931.368	9.313.680
		063.01.DR.4127 52 BELANJA BARANG DAN JASA	465.684	465.684	465.684	931.368	931.368	1.397.052	465.684	465.684	931.368	931.368	931.368	931.368	9.313.680
		Registrasi Obat	250.836	1.314.241	1.221.316	1.080.963	1.171.821	1.370.783	873.279	1.057.681	1.023.713	1.166.676	1.074.070	1.049.544	12.654.921

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

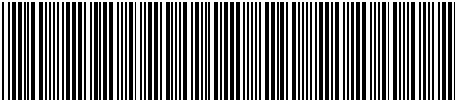
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
063.01.DR.4131		52 BELANJA BARANG DAN JASA	245.836	1.309.241	1.211.316	1.075.963	1.161.821	1.360.783	868.279	1.047.681	1.013.713	1.156.676	1.064.070	1.039.544	12.554.921
		53 BELANJA MODAL	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
		Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	0	186.674	616.855	468.736	1.619.130	802.067	740.561	537.306	595.604	591.431	1.254.199	7.412.562
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	186.674	330.499	460.563	673.916	607.067	740.561	537.306	592.235	591.431	1.219.485	5.939.737
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	286.356	8.173	945.214	195.000	0	0	3.369	0	34.714	1.472.825
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.110	46.129.100
		- PNBP (425321)	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	6.636.000
		- PNBP (425321)	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.849	34.546.100
		- PNBP (425321)	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.424	2.957.000
		- PNBP (425321)	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.837	1.990.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



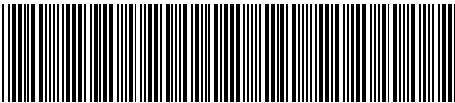
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.650
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 36.386.367		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 36.363.542	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 22.825	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.379
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3165.BKB	Pemantauan produk	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.260		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.921
	Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.206		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 341.248
	A		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.020		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.320
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.825		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.319
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



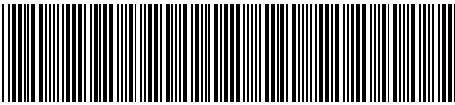
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	4122.QAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM)		Pelayanan Publik Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 119.882	521211	Belanja Bahan(RM)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.208
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.600	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.609
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 212.019	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.781
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 420.594	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.640
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.680	4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		A
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.077.160	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 259
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		A
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 399.065	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	521211	Belanja Bahan(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



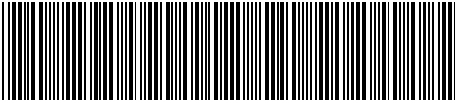
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.447 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.941 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 511.012 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.920 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.835 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.640 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.900 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 217.727 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



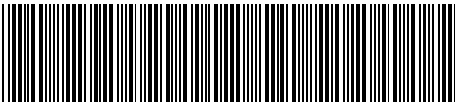
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4123	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 231.362	4123.BIA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.050
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Efisiensi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.087		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		Efisiensi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.453		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	a		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.156
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)		Efisiensi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.644		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
4123.BAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		Efisiensi
	Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.291		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 282.372
	Efisiensi		Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Pengawasan dan Pengendalian Produk
4123.BIA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.897	4123.BIA	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4123.BIA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.050	4123.BIA	521211 Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.736
			Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

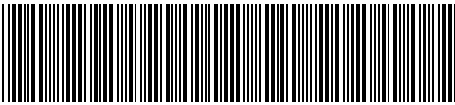


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.640		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 282.192
	Efisiensi		Efisiensi
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.250		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.000
	Efisiensi		Efisiensi
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.662	521211	Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.070
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.098
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 337.990	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.050
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.990	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.500
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 654.085	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.600
			Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.955	521211	Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.944
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 767.368	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.100
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.550	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.237.209	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 415.687
			Efisiensi

Abstract

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

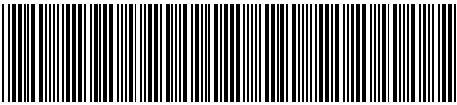
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
4125 4125.BAH	Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi	Rp. 161.700	Disposisi: 521219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 134.307	
	Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi	Rp. 237.432	Disposisi: 522141	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.525	
	Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi	Rp. 6.270	Disposisi: 522151	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 166.100	
	Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi	Rp. 1.250.485	Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 244.637	
	Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi	Rp. 1.566.035	Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 9.690	
	Disposisi: 4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.141.100
	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 132.579	Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 253.808	
	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.278				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

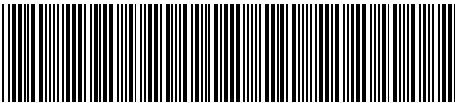


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4125.QAH	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	522141 Belanja Sewa(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.102.932	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.544	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 950.200	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Pelayanan Publik Lainnya	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	
	521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.245	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216.271	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.150	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.590	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.252	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.680	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.869		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



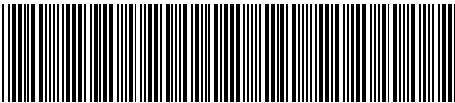
DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4125.QIC	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4127.ACA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 369.864		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 531.258
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 293.855		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.260
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.088		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
4125.QIC	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4127.ACA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.080
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.700		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 703.950
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.300		4127 Registrasi Obat
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4127.ACA Perizinan Produk
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.040
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.160		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
4125.QIC	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4125.QIC	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000
	521211 Belanja Bahan(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

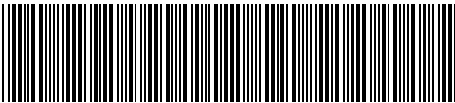


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.BAH	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 291.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522112 Belanja Langganan Telepon(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 208.440		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.640		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.082.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
4127.BAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.680		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Pelayanan Publik Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.400
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4127.BAH	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.700
4127.BAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 344.300		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

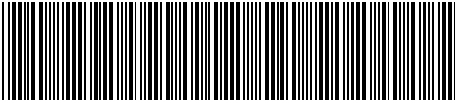


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.PCA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Perizinan Produk		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 833.048
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.700		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 785.784
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.534		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.465
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.519		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.775
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.085		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 186.322
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.080
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.500		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

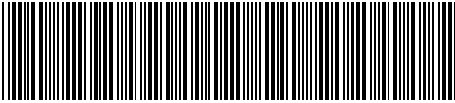


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4131 4131.ABG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.150		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.595
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 307.375		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	ebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.700
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.907		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.000
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 927.021		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.915
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.046		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.085
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.665		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.500
	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Kebijakan Bidang Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R

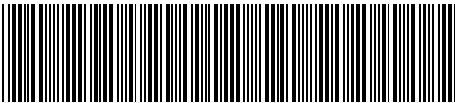


DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
4131.AFA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 456.600			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.039
		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 509.850			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 239.520
		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 555.000			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.950
		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 933.060
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211	Belanja Bahan(RM)			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.940
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.115			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.200			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4131.CAB Sarana Bidang Kesehatan		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.214			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 780	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



DS:6783-1594-3057-2359

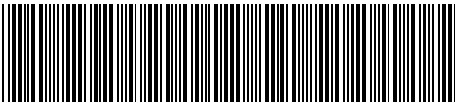
Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.045 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6783-1594-3057-2359

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503